

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan lembaran daerah yang belum berbasis digital menurut perspektif asas fiksi hukum mencakup pemahaman tentang perlunya mempertimbangkan validitas hukum dari lembaran daerah yang masih dalam bentuk konvensional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak pemerintah daerah yang belum melakukan digitalisasi terhadap lembaran daerah mereka. Pada penelitian ini mencakup juga perlunya meninjau kembali landasan hukum yang mengatur pembentukan dan keabsahan lembaran daerah yang belum terdigitalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu disiplin perspektif yang memandang hukum dari segi norma-norma. Dalam hal ini berarti bahwa penelitian dilakukan berdasarkan kenyataan. Kenyataan yang dimaksud merupakan pelaksanaan atau praktik hukum yang berlaku di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *historical approach*.

Keabsahan lembaran daerah yang belum berbasis digital ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat formal dan substansi yang diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika proses pembentukannya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dan isi dari lembaran tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, maka lembaran daerah tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang telah terdigitalisasi.

Kata kunci: asas fiksi hukum, lembaran daerah, digitalisasi.

ABSTRACT

This research discusses the validity of regional gazettes that are not yet digitally based according to the perspective of the principle of law fiction, including an understanding of the need to consider the legal validity of regional gazettes that are still in conventional form. Along with the development of information technology, many regional governments have not digitized their regional gazettes. This research also includes the need to review the legal basis that regulates the formation and validity of regional gazettes that have not been digitized.

The type of research used in this research is normative legal research, namely a disciplinary perspective that views law in terms of norms. In this case it means that the research is carried out based on reality. The reality in question is the implementation or practice of law that applies in society. The approaches used in this research are the statute approach and the historical approach.

The validity of regional gazettes that are not yet digitally based is determined by the fulfillment of the formal and substantive requirements stipulated in the applicable law or statutory regulations. If the formation process is in accordance with the regulated provisions and the contents of the sheet do not conflict with higher law, then the regional sheet is considered valid and has the same legal force as the one that has been digitized.

Keywords: principles of law fiction, regional gazette, digitalization.